



**Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan
Orang di Malaysia (2012-2017)**

Skripsi

**Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Starta-1 dalam Ilmu
Hubungan Internasional**

Disusun oleh:

Aditya Rizky Dwirivanda

NIM 14010413140084

FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

MOTTO

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

-QS. Al-Insyirah, 6-8

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017)**

Nama Penyusun : Aditya Rizky Dwirivanda

NIM : 14010413140084

Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

NIP 19640827.199001.1.001

Wakil Dekan 1



Dr. Teguh Yuwono, M.Po.Admin

NIP 19690822.199403.1.003

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Reni Windiani, MS


(.....)

Dosen Penguji :

1. Marten Hanura, S.IP., MPS


(.....)

Shary Charlotte, S.IP., MA


(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Indonesia terhadap Penanganan Korban Kejahatan Orang di Malaysia (2012-2017)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk kepada yang terhormat: Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan Dr. Reni Windiani, MS, selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini yang juga merupakan dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Shary Charlotte, S.IP, MA, Marten Hanura, S.IP, MPS, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Pak Fidel, Bu Retno, Pak Ridwan, dan Bu Ira yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis cintai, Budi Setiawan dan Almh. Ambarwati yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta kakak dan adik yang selalu memberikan support. Selain itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para teman dan sahabat di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro, dan yang lainnya. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.

Dukungan berupa sumber-sumber sangat diperlukan. Oleh sebab itu, penulis memberikan terima kasih kepada UPT Perpustakaan Undip, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang.

Skripsi ini pada hakikatnya masih banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Meski sedikit, semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	9
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	24
BAB II PERKEMBANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG dan SIKAP PEMERINTAH INDONESIA	
2.1 Sejarah Perkembangan Kejahatan Perdagangan Orang	25
2.2 Fenomena Perdagangan Orang antara Indonesia - Malaysia	27
2.3 Sikap Indonesia terhadap Kejahatan Perdagangan Orang	31
2.3.1 Asas Kedaulatan	31
2.3.2 Kebijakan Indonesia	35
2.3.3 Kerja Sama Internasional Indonesia	38
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA dalam PENCEGAHAN dan PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	
3.1 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Joint Police Cooperation Committe (JPCC)	40
3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui UU nomor 21 Tahun 2007 mengenai PTPPO	50
3.2.1 Kebijakan Indonesia Tentang Restitusi melalui Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007	52

3.2.2	Kebijakan Indonesia mengenai Sinergi Pemerintah melalui Pasal 58 UU Nomor 21 Tahun 2007	56
BAB IV	KESIMPULAN	60
	4.1 Kesimpulan	
	4.2 Saran	
	DAFTAR PUSTAKA	64

KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG di MALAYSIA (2012-2017)

Aditya Rizky Dwirivanda

14010413140084

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Human trafficking atau kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional kini telah menjadi isu hangat dalam hubungan internasional dan banyak menjadi bahasan di forum-forum internasional, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah korban tiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak akibat aktivitas kejahatan transnasional ini. Dalam menghadapi fenomena kejahatan ini, Indonesia kemudian mengambil sikap dengan menegeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang. Tidak hanya memiliki kebijakan dalam negeri saja, Indonesia juga memiliki kebijakan dengan menjalin kerja sama dengan Malaysia yang diwujudkan dalam *Joint Police Cooperation Committee* sebagai kerja sama kedua negara dalam menaggulangi kejahatan lintas batas yang terjadi di perbatasan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi kebijakan yang dimiliki Indonesia dalam memerangi kejahatan perdagangan orang dan penanganan korban, dengan menggunakan teori liberalisme dan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik penelitian tinjauan literatur dan wawancara. Penelitian ini menemukan banyak faktor yang menyebabkan korban kejahatan perdagangan orang selalu tinggi disamping Pemerintah yang sudah memiliki kebijakan dan kerja sama terkait hal tersebut.

Kata kunci : Kejahatan Perdagangan Orang, Kebijakan Indonesia, Kerja sama Indonesia – Malaysia